

Evaluasi Rp2kpkp Berdasarkan Kriteria Livable City di Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Rp2kpkp Evaluation Based on Criteria of Livable City

¹Diniya Ayu Wulandari, ²Ernawati Hendrakusumah

^{1,2}Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹diniyaayuwuland@gmail.com, ²erkoes18@gmail.com

Abstract. The Government of Indonesia in meeting the target of SDG's has announced 100-0-100 program that aims to address housing and urban slums that are clearly targeted at RPJMN 2015-2019. The efforts of the Government of Indonesia to deal with the increase in the quality of the environment and prevention of slums in urban as well as in rural areas one of which is done through RP2KPKP activities (plan of prevention and improved quality of the slums Urban) which is one of the Government's efforts in realizing 0% slums. Seen from the utilization of space settlements, slums is defined as the area of the settlement is not feasible where the RP2KPKP is limited to the physical condition of settlements with 7 elements, namely in terms of the condition of the building's layout, road conditions environment, the condition of the provision of drinking water, drainage conditions of the environment, waste water management conditions, the condition of the management persampahan, and the condition of fire protection. While one purpose of the SDG's to handle the slums with livable. For that purpose then this research to conduct the evaluation of RP2KPKP in the village Trenches are already meets the criteria livable (Livable City) and what must be done to meet the criteria of livable (Livable City). The method of implementation is done by the method of descriptive approach by conducting evaluation of RP2KPKP with 9 aspect consisting of 21 criteria livable (Livable City) according to IAP (Bond Expert Planners) and assessment methods of analysis conformance criteria livable (Livable City) were analyzed with the use of classifications of high, medium and low in the ratings. Based on the results of the analysis that has been done, found habitable indicators (Livable City) in RP2KPKP that does not meet the criteria of low suitability classification with as many as 14 indicators (environmental hygiene, quality level environmental pollution, the availability of public transport, the quality of public transport, the availability of health facilities, the quality of health facilities, the availability of educational facilities, the quality of educational facilities, the availability of electric power, network telecommunications, workplace accessibility level, low levels of crime, information on public services, the availability of the facilities the House diffable) that where these indicators will be used as recommendations in the development and improvement of the environment the Livable neighborhoods (Livable City). This means that the village Ditch still do not meet the criteria of livable (Livable City) which should be the criteria that must be met as much as 21 indicators.

Keywords: RP2KPKP, Livable, Livable City.

Abstrak. Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target SDG's telah mencanangkan program 100-0-100 yang bertujuan untuk menangani perumahan dan permukiman kumuh perkotaan yang secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019. Upaya pemerintah Indonesia untuk menangani peningkatan kualitas dan pencegahan lingkungan permukiman kumuh di perkotaan maupun di perdesaan salah satunya dilakukan melalui kegiatan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan 0% kumuh. Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dimana RP2KPKP yang hanya terbatas pada kondisi fisik permukiman dengan 7 elemen yaitu ditinjau dari kondisi tata bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Sedangkan salah satu tujuan SDG's untuk menangani permukiman kumuh dengan layak huni. Untuk itu maka tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi terhadap RP2KPKP di Kelurahan Parit apakah sudah memenuhi kriteria layak huni (Livable City) dan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kriteria layak huni (Livable City). Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan metode pendekatan deskriptif dengan melakukan evaluasi terhadap RP2KPKP dengan 9 aspek yang terdiri dari 21 kriteria layak huni (Livable City) menurut IAP (Ikatan Ahli Perencana) dengan metode analisis penilaian kesesuaian kriteria layak huni (Livable City) yang dianalisis dengan menggunakan klasifikasi tinggi, sedang dan rendah dalam penilaian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan indikator-indikator layak huni (Livable City) di dalam RP2KPKP yang tidak memenuhi kriteria dengan klasifikasi kesesuaian

rendah sebanyak 14 indikator (kualitas kebersihan lingkungan, tingkat pencemaran lingkungan, ketersediaan angkutan umum, kualitas angkutan umum, ketersediaan fasilitas kesehatan, kualitas fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas fasilitas pendidikan, ketersediaan energi listrik, jaringan telekomunikasi, tingkat aksesibilitas tempat kerja, rendahnya tingkat kriminalitas, informasi pelayanan publik, ketersediaan fasilitas kaum difabel) yang dimana indikator ini akan dijadikan rekomendasi dalam peningkatan dan pengembangan lingkungan permukiman yang layak huni (*Livable City*). Hal ini berarti bahwa Kelurahan Parit masih belum memenuhi kriteria layak huni (*Livable City*) dimana seharusnya kriteria yang harus dipenuhi sebanyak 21 indikator.

Kata Kunci: RP2KPKP, Layak Huni, *Livable City*.

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target MDG's telah mencanangkan program 100-0-100 yang bertujuan untuk menangani perumahan dan permukiman kumuh perkotaan, bahkan zero kumuh yang secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019. Upaya pemerintah Indonesia untuk menangani peningkatan kualitas dan pencegahan lingkungan permukiman kumuh di perkotaan maupun di perdesaan salah satunya dilakukan melalui kegiatan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan 0% kumuh.

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dimana RP2KPKP menilai yang hanya terbatas pada kondisi fisik permukiman dengan 7 elemen yaitu ditinjau dari kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Namun, untuk memenuhi layak huni (*Livable City*) tidak sepenuhnya ditinjau dari aspek fisik saja seperti yang dinilai dalam RP2KPKP, tetapi perlu dilakukan peninjauan seperti pada 9 aspek menurut IAP (Ikatan Ahli Perencana) diantaranya; aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek transportasi, aspek fasilitas kesehatan, aspek fasilitas pendidikan, aspek infrastruktur-utilitas, aspek ekonomi, aspek keamanan, dan aspek sosial.

Fenomena maraknya permukiman kumuh sebagai salah satu permasalahan khususnya di Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan. Dari fenomena tersebut, memunculkan sebuah argumen terkait tingkat kenyamanan permukiman Kelurahan Parit saat ini sehingga masih dapat dikatakan “layak untuk dihuni”. Seiring dengan kebutuhan tersebut, kota sebagai pusat konsentrasi kegiatan dan pelayanan masyarakat berkembang sangat cepat. Perkembangan ini tidak menutup kemungkinan mengikis nilai *livable* yang dulunya sudah terbangun dalam suatu kota.

Dari permasalahan di atas, maka masyarakat Kelurahan Parit membutuhkan kota yang layak huni untuk mereka atau disebut *Livable City*. *Livable City* menjadi kata kunci dalam perencanaan kota, karena dapat menyelesaikan berbagai masalah kota yang mengganggu kenyamanan kota. Dengan cara menaikkan kualitas hidup yang masyarakat yang tinggal di kota terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang dan taman hijau. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah RP2KPKP yang telah dibuat sudah memenuhi kriteria layak huni (*livable city*)? dan Apa saja tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kriteria layak huni (*livable city*)?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui apakah RP2KPKP sudah memenuhi kriteria layak huni (*livable city*)

2. Untuk mengetahui apa saja tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kriteria layak huni (*livable city*)

B. Landasan Teori

RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan)

Amanat Undang-undang No. 1 tahun 2011 dimana penyelenggaraan kawasan permukiman perlu didasarkan pada suatu dokumen rencana yang terpadu dan terintegrasi yaitu Rencana Kawasan Permukiman, dapat diartikan pula bahwa dalam konteks penanganan permukiman kumuh perlu juga memiliki suatu instrumen yang dapat menaungi upaya pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh yaitu RP2KPKP.

Teori Kota Layak Huni (*Livable City*)

Menurut Hahlweg (1997), kota yang layak huni adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat. Menurut Evan (2002), konsep *Livable City* digunakan untuk mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup membutuhkan fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya.

Dalam mewujudkan konsep *Livable City* harus didukung dengan *sustainable city*, agar perencanaan ruang kota dapat terwujud sesuai rencana. Dalam konteks keberlanjutan adalah kemampuan untuk mempertahankan kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat kota saat ini maupun masa depan.

Pada akhir tahun 2009 Ikatan Ahli Perencana (IAP) merilis *Most Livable City Index*. *Most Livable City Index* merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota dengan melihat dari 9 aspek yaitu:

Tabel 1. Kriteria RP2KPKP *Livable City* Menurut IAP

RP2KPKP			<i>Livable City</i> Menurut IAP	
No.	Aspek	Indikator	Aspek	Indikator
1	Kondisi Tata Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Aspek Tata Ruang	Kualitas penataan kota
		Kepadatan Bangunan		Jumlah ruang terbuka
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Aspek Transportasi	Ketersediaan angkutan umum
		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		kualitas angkutan umum
3	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Aspek Lingkungan	Kualitas kondisi jalan,
		Ketidaktersediaan Drainase		Kualitas fasilitas pejalan kaki.
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Aspek Keamanan	Kualitas kebersihan lingkungan
		Tidak terpeliharanya Drainase		Tingkat pencemaran lingkungan
4		Kualitas Konstruksi Drainase	Aspek Sosial	Rendahnya tingkat kriminalitas
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis		Interaksi hubungan antarpenduduk,

RP2KPKP			Livable City Menurut IAP	
No.	Aspek	Indikator	Aspek	Indikator
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Informasi pelayanan publik,
	Kondisi Penyediaan Air minum	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan		Ketersediaan fasilitas kaum difabel.
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Aspek Ekonomi	Ketersediaan lapangan pekerjaan
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Aspek Infrastruktur – Utilitas	Tingkat aksesibilitas tempat kerja,
		Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Ketersediaan fasilitas rekreasi
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Aspek Fasilitas Kesehatan	Kualitas fasilitas rekreasi
		Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Ketersediaan energi listrik
			Aspek Fasilitas Pendidikan	Ketersediaan air bersih
				Kualitas air bersih
				Jaringan telekomunikasi
			Aspek Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan fasilitas kesehatan
			Aspek Fasilitas Pendidikan	Kualitas fasilitas kesehatan
				Ketersediaan fasilitas pendidikan
				Kualitas fasilitas pendidikan,

Sumber : RP2KPKP dan IAP (Ikatan Ahli Perencana), 2009

Teori Permukiman Kumuh Perkotaan

Ciri-ciri permukiman kumuh perkotaan, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :
 - a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.

5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

Berdasarkan salah satu ciri diatas, disebutkan bahwa permukiman kumuh perkotaan memiliki ciri “kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin”. Penggunaan ruang tersebut berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul pada daerah sempadan untuk kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Keadaan demikian menunjukkan bahwa penghuninya yang kurang mampu untuk membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data RP2KPKP Kabupaten Belitung Tahun 2016

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) adalah menghasilkan dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah kota/kabupaten secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yaitu:

- 1) Memantapkan pemahaman pemerintah kota/kabupaten tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam mencapai target zero kumuh (100-0-100) pada tahun 2019,
- 2) Agar pemerintah kota/kabupaten dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dalam penyusunan RP2KPKP yang difokuskan pada penanganan permukiman kumuh perkotaan,
- 3) Agar pemerintah kota/kabupaten punya komitmen tinggi serta konsisten didalam implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya.

Berikut merupakan program rencana yang akan dilaksanakan oleh RP2KPKP Kabupaten Belitung:

7. Aspek Hunian:
 - a. Perbaikan rumah tidak layak huni
 - b. Sosialisasi kepada warga di tepi saluran
2. Aspek Jaringan Jalan Lingkungan
 - a. Perencanaan peningkatan jalan lingkungan
 - b. Pelaksanaan peningkatan jalan lingkungan
 - c. Perencanaan pembangunan jalan lingkungan
 - d. Pembangunan jalan lingkungan

- e. Perencanaan pembangunan jalan inspeksi
- f. Pembangunan jalan inspeksi
3. Aspek Jaringan Drainase
 - a. Perencanaan peningkatan drainase primer
 - b. Peningkatan drainase primer
 - c. Perencanaan peningkatan drainase sekunder
 - d. Peningkatan drainase sekunder
 - e. Perencanaan peningkatan drainase tersier
 - f. Peningkatan drainase tersier
 - g. Perencanaan pembangunan drainase tersier
 - h. Pembangunan drainase tersier
4. Aspek Persampahan
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana dump truck untuk TPS
 - b. Pembentukan lembaga pengelolaan sampah
 - c. Penyediaan prasarana dan sarana gerobak sampah
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana bak sampah
5. Aspek Air Minum
 - a. Pembangunan jaringan distribusi primer dan sekunder air minum dalam kawasan
 - b. Perencanaan pembangunan jaringan pipa tersier
 - c. Pembangunan jaringan pipa tersier
 - d. Aspek Air Limbah
 - e. Sosialisasi perilaku bersih dan hidup sehat.
6. Aspek Proteksi Kebakaran
 - a. Pengadaan Hydrant
7. Aspek Ruang Terbuka Hijau
 - a. Penanaman vegetasi di sisi jalan utama dan jalan lokal kawasan
 - b. Penghijauan di tepi sungai
 - c. Penyusunan aturan bersama warga tentang penghijauan.

Analisis

Analisis Penilaian Kesesuaian Kriteria Layak Huni (*Livable City*)

Input data yang dibutuhkan untuk analisis ini yaitu kriteria-kriteria permukiman layak huni (*Livable City*) dengan cakupan melakukan evaluasi terhadap kondisi lingkungan permukiman kumuh yang telah dilakukan dalam P2KPKP Kabupaten Belitung Tahun 2016.

Tabel 2. Analisis Penilaian Kesesuaian Kriteria Layak Huni (*Livable City*)

No	Aspek	Indikator	Kriteria		
			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Aspek Tata Ruang	Kualitas penataan kota		X	
		Jumlah ruang terbuka	X		
2	Aspek Lingkungan	Kualitas kebersihan lingkungan			X
		Tingkat pencemaran lingkungan			X
3	Aspek Transportasi	Ketersediaan angkutan umum			X
		kualitas angkutan umum			X
		Kualitas kondisi jalan	X		
		Kualitas fasilitas pejalan kaki	X		

No	Aspek	Indikator	Kriteria		
			Tinggi	Sedang	Rendah
4	Aspek Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan fasilitas kesehatan			X
		Kualitas fasilitas kesehatan			X
5	Aspek Fasilitas Pendidikan	Ketersediaan fasilitas pendidikan			X
		Kualitas fasilitas pendidikan,			X
6	Aspek Infrastruktur – Utilitas	Ketersediaan energi listrik			X
		Ketersediaan air bersih	X		
		Kualitas air bersih	X		
		Jaringan telekomunikasi			X
7	Aspek Ekonomi	Tingkat aksesibilitas tempat kerja			X
8	Aspek Keamanan	Rendahnya tingkat kriminalitas			X
9	Aspek Sosial	Interaksi hubungan antarpenduduk		X	
		Informasi pelayanan publik			X
		Ketersediaan fasilitas kaum difabel.			X

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Keterangan:

Tinggi : Sesuai dengan parameter

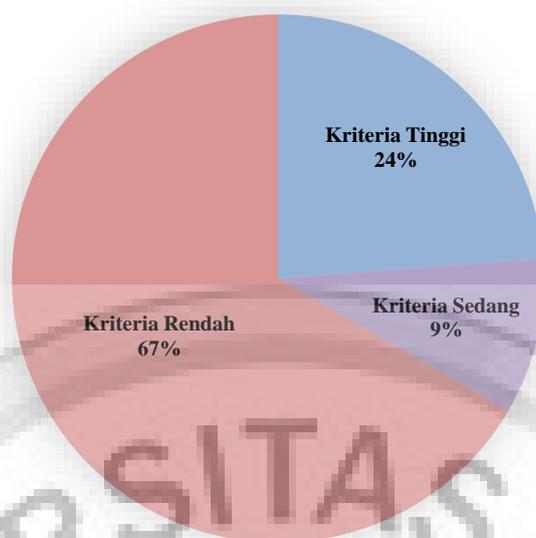
Sedang : Sesuai tetapi masih terdapat parameter yang belum memenuhi

Rendah : Sesuai dengan parameter

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, dapat diketahui bahwa RP2KPKP dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi kriteria-kriteria layak huni (*livable city*) dikarenakan RP2KPKP hanya terbatas pada penilaian aspek fisik yang belum menuju layak huni dan dapat dilihat pada analisis persentase kriteria rendah sebesar 67%. Berikut jumlah indikator berdasarkan masing-masing kriteria:

Kriteria tinggi = 5 indikator
 Kriteria sedang = 2 indikator
 Kriteria rendah = 14 indikator



Gambar 1. Persentase Kriteria Layak Huni Kelurahan Parit di RP2KPKP

E. Rekomendasi

Melalui penelitian ini, Kelurahan Parit termasuk dalam kawasan yang belum memenuhi kriteria layak harus ditingkatkan dan dikembangkan lebih baik lagi. Adapun beberapa point penting yang dapat direkomendasikan sebagai contoh adalah:

1. Kualitas kebersihan lingkungan yang memperhatikan keamanan, kesehatan, keharmonisan dan berkelanjutan.
2. Tingkat pencemaran lingkungan yang diperhatikan dengan tidak membuang sampah dengan penyediaan tempat sampah dengan konsep 3R.
3. Ketersediaan angkutan umum dengan penyediaan moda angkutan sesuai dengan rute-rute.
4. Kualitas angkutan umum dengan penyediaan kendaraan angkutan umum yang nyaman, aman dan mudah.
5. Ketersediaan fasilitas kesehatan yaitu terdapat balai pengobatan setiap 3.000 jiwa
6. Kualitas fasilitas kesehatan dengan lokasi yang bersih, jauh dari sumber penyakit, dan tidak tercemar.
7. Ketersediaan fasilitas pendidikan minimal 1 unit TK untuk setiap 1.000 penduduk
8. Kualitas fasilitas pendidikan dengan lokasi yang bersih, mudah dicapai, tidak bising, jauh dari sumber penyakit dan tidak tercemar.
9. Ketersediaan energi listrik
10. Jaringan telekomunikasi dengan jangkauan dan tingkat pelayanannya mudah dijangkau.
11. Tingkat aksesibilitas tempat kerja yang mudah diakses.
12. Rendahnya tingkat kriminalitas
13. Informasi pelayanan publik dengan keakurasian informasi, kemudahan akses serta bersifat transparan.
14. Ketersediaan fasilitas kaum difabel dengan memperhatikan ruang sehingga memudahkan masyarakat dalam enjangkau area-area tertentu untuk semua kalangan.

Untuk mewujudkan dan memenuhi kriteria layak huni (*Livable City*) di Kelurahan Parit maka di dalam RP2KPKP yang telah di evaluasi dimana 14 indikator diatas harus ditingkatkan dan dikembangkan, guna melengkapi kebutuhan kriteria-kriteria untuk mewujudkan permukiman yang layak huni (*Livable City*).

Daftar Pustaka

- Alit, I. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Di Propinsi Bali*. Jurnal Permukiman Natak Vol. 3 No.1 , 1-61: 2005.
- Andiana, Yudi dan Hendrakusumah, Ernawati. 2016. Sinkronisasi Perencanaan Ruang Wilayah (*Spatial Planning*) Dengan Perencanaan Pembangunan (*Sectoral Planning*). Bandung.
- Bagio, Anthony G. dan Bharat Dahiya, *Urban Environment And Infrastructure: Toward Livable Cities*, World Bank, Waisngton: 2004
- IAP. 2009. Indonesia Most Livable City Index 2009. Jakarta: Ikatan Ahli Perencana Indonesia.
- Pontoh, Nia K dan Kustiwan, Iwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: ITB.
- RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) Kabupaten Belitung Tahun 2016
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & RND. Bandung: Alfabeta.